

TIAP PUSKESMAS TERSEDIA LAYANAN KONSULTASI

Yogya Dorong Masyarakat Pahami Kawasan Tanpa Rokok

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya terus menggencarkan sosialisasi Perda 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Langkah tersebut guna mendorong pemahaman yang utuh dari masyarakat terkait penerapan kawasan tanpa rokok.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menilai perda tersebut dihadirkan bukan untuk melarang aktivitas merokok, melainkan mengatur di mana boleh merokok dan yang tidak diperbolehkan. "Persepsi masyarakat ini yang perlu kita arahkan bersama. Tujuan perda itu ialah untuk melindungi semua orang dan menciptakan udara yang sehat," urainya di sela workshop Perda 2/2017 kepada wartawan di Abadi Hotel, Rabu (24/3).

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menilai perda tersebut dihadirkan bukan untuk melarang aktivitas merokok, melainkan mengatur di mana boleh merokok dan yang tidak diperbolehkan. "Persepsi masyarakat ini yang perlu kita arahkan bersama. Tujuan perda itu ialah untuk melindungi semua orang dan menciptakan udara yang sehat," urainya di sela workshop Perda 2/2017 kepada wartawan di Abadi Hotel, Rabu (24/3).

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menilai perda tersebut dihadirkan bukan untuk melarang aktivitas merokok, melainkan mengatur di mana boleh merokok dan yang tidak diperbolehkan. "Persepsi masyarakat ini yang perlu kita arahkan bersama. Tujuan perda itu ialah untuk melindungi semua orang dan menciptakan udara yang sehat," urainya di sela workshop Perda 2/2017 kepada wartawan di Abadi Hotel, Rabu (24/3).

kan tempat khusus merokok," imbuhnya.

Oleh karena itu petugas masih intensif memberikan imbauan agar tidak sembarangan merokok. Penerapan sanksi sebenarnya sudah cukup dipersempit, namun dalam kondisi pandemi menuntut pemerintah agar tidak semena-mena dalam menjatuhkan sanksi berupa denda. Sehingga dibutuhkan pemahaman bersama agar Perda 2/2017 bisa berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menambahkan kawasan yang ditetapkan

sebagai KTR juga wajib menyediakan tempat khusus merokok. Dengan begitu perokok aktif bisa tetap mendapatkan hak tanpa mengganggu perokok pasif. Hal ini karena dampak asap rokok terhadap kesehatan lebih berbahaya bagi perokok pasif.

Bagi masyarakat yang memiliki niat untuk berhenti merokok pun saat ini sudah tersedia layanan konsultasi berhenti merokok yang tersebar di seluruh puskesmas. Total ada 18 puskesmas di Kota Yogya yang memberikan layanan tersebut. "Siapa pun bisa mengaksesnya. Bagi penduduk dengan KTP Kota Yogya layanan itu bisa

dinikmati secara gratis," tandasnya.

Sementara gerakan untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai KTR, saat ini sudah terbentuk 230 RW yang mendeklarasikan

diri sebagai kawasan tanpa rokok. Setidaknya, warga di kawasan tersebut sepatutnya untuk tidak merokok saat di pertemuan, di depan ibu hamil, dan anak-anak serta di dalam rumah. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan
Kawasan Malioboro yang kini sudah ditetapkan sebagai salah satu kawasan tanpa rokok.

JOGJA VAGANZA HADIRKAN 100 'BUYER'

Disiplin Prokes, Optimis Wisata Menggeliat

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya terus menggenjot sektor pariwisata agar kembali menggeliat di tengah pandemi. Apalagi sektor destinasi kini cukup disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) sehingga Yogya dipastikan aman untuk dikunjungi.

Asisten Perekonomian Setda Kota Yogya Kadri Renggono, mengatakan industri pariwisata menjadi motor utama penggerak roda perekonomian di Kota Yogya. "Jika kita melihat pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogya, sebagian besar berasal dari sektor pariwisata, pelayanan jasa serta perdagangan umum," jelasnya saat membuka Table Top rangkaian Jogja Vaganza di Grand Inna Malioboro Hotel, Rabu (24/3).

Jogja Vaganza tersebut menghadirkan 100 buyer dari luar daerah. Mereka adalah pelaku in-

dustri pariwisata yang selama ini menjembatani wisatawan untuk rekreasi. Melalui table top, diharapkan para buyer memperoleh gambaran detail mengenai atraksi dan destinasi wisata di Kota Yogya sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kadri mengungkapkan pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan yang sangat tajam di sektor pariwisata Kota Yogya termasuk pada usaha penginapan, transportasi, dan kuliner. Sebelum pandemi Covid-19, katanya, tingkat kunjungan wisatawan ke Yogya pada tahun 2019 mencapai angka 4,3 juta pengunjung. Sementara jumlah wisatawan mancanegara mencapai 498.866 orang dengan rata-rata lama tinggal di Kota Yogya 2,08 hari.

"Kondisi pandemi juga mengakibatkan banyaknya karyawan yang dirumahkan. Padahal Kota Yogya

memiliki potensi wisata yang besar," katanya.

Ia menjelaskan daya tarik Kota Yogya terletak pada kekayaan seni budaya, keragaman objek wisata, dan kreativitas warganya dalam upaya mengangkat berbagai keunikan yang dimiliki untuk kemudian menjadi sesuatu yang layak jual atau layak untuk ditampilkan bagi para wisatawan yang mengunjungi Kota Yogya. Kondisi ini sangat berdampak pada minat wisatawan untuk berkunjung hingga akhirnya menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Apalagi Kota Yogya tidak memiliki sumber daya alam seperti halnya kabupaten lain di DIY.

Saat ini di Kota Yogya ada 18 kampung wisata serta kurang lebih 23.000 UMKM sebagai pendukung usaha wisata, dan juga terdapat 696 kelompok kesenian tersebar di 14 kemantren. Melihat begitu berpen-

garuhnya industri pariwisata pada roda perekonomian Kota Yogya, lanjutnya, pengembangan pariwisata membutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

Sementara Ketua Jogja Vaganza 2021 Edwin Ismedi Himna, mengatakan even tersebut merupakan bentuk upaya kerja sama di antara segenap mitra usaha dunia pariwisata bersama dengan Pemkot Yogya. Terutama sebagai wahana promosi untuk menggiatkan kembali dunia usaha pariwisata, mempertemukan antara berbagai kelompok usaha wisata Kota Yogya dengan segenap buyer dan pelaku pariwisata.

Sedangkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo mengatakan, pihaknya siap menerima tamu dan wisatawan yang berkunjung ke Yogya. (Dhi)-f



Pembukaan Diklat 3 in 1 serentak di 7 Balai Diklat Industri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

DIKLAT 3 IN 1 SERENTAK 7 BDI

JAKARTA (KR) - Di tengah terpaan Covid-19 sepanjang 2020, sektor industri masih menjadi penumbang PDB terbesar yaitu 19,86% di mana industri pengolahan nonmigas menyumbang 17,9%. Pemerintah terus mendorong penguatan struktur industri yang lebih dalam dan terintegrasi sehingga mampu menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi. Salah satu industri yang menunjukkan kinerja prima di tengah pandemi ini adalah sektor industri farmasi dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah yang cukup besar untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat berdamai dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional.

Kami yakin ke depan kondisi ini akan terus meningkat menyusul kebijakan-kebijakan yang baru diluncurkan seperti pemberian insentif fiskal penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor yang akan meningkatkan kepercayaan pelaku industri dan peningkatan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah, Kementerian Perindustrian juga berupaya memulihkan perekonomian dan meningkatkan daya saing industri nasional antara lain dengan menjaga produktivitas industri selama pandemi melalui kebijakan pemberian Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), Implementasi Making Indonesia 4.0, dengan 7 sektor prioritas, yaitu industri makanan dan minuman, kimia, tekstil & busana, otomotif, elektronika, farmasi dan alat Kesehatan serta Pembangunan Pusat Inovasi Digital dan Pengembangan SDM Industri 4.0 (PIDI 4.0), yang diharapkan akan menjadi solusi satu atap penerapan industri 4.0 di Indonesia dan Jendela Indonesia 4.0 untuk dunia.

Untuk mendorong pertumbuhan industri nasional, terdapat 3 pilar utama yang harus menjadi

perhatian, yaitu investasi, teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM yang berkualitas.

"Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan nasional saat ini difokuskan pada pembangunan SDM yang berkualitas, untuk itu perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih masif," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Pembukaan Diklat 3 in 1 serentak di 7 Balai Diklat Industri (BDI) secara virtual, Rabu (24/3).

Terkait itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Pelatihan 3 in 1 berbasis kompetensi sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja industri kompeten sesuai kebutuhan industri, sekaligus upaya untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM agar siap bersaing.

Menteri Perindustrian menjelaskan, era revolusi industri 4.0 yang saat ini tengah kita jalani menuntut SDM yang cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi digital. "Untuk itu diperlukan adanya pembekalan keterampilan dasar, peningkatan keterampilan (up-skilling) atau penguasaan keterampilan (re-skilling) bagi para tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan dunia industri saat ini," tegasnya.

"Penyelenggaraan diklat 3 in 1 juga sebagai salah satu langkah penanggulangan dampak Pandemi COVID 19 melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan jumlah PHK di industri," sebut Agus Gumiwang. Dengan tersedianya tenaga kerja industri kompeten diharapkan utilitas industri dapat kembali meningkat, selain itu ada sesuatu yang istimewa dari kegiatan Pembukaan Diklat 3 in 1 Serentak pada kesempatan kali ini. 'Yaitu keterlibatan

sahabat-sahabat kita para penyandang disabilitas sebagai calon tenaga kerja pada berbagai sektor industri di Indonesia. Hal ini menunjukkan negara hadir untuk seluruh elemen masyarakat dan Kementerian Perindustrian selalu mendorong industri yang ramah bagi penyandang disabilitas" paparnya.

"Pelaksanaan Diklat 3 in 1 yang dilaksanakan pada hari ini sangat spesial karena dilakukan secara serentak oleh 7 (tujuh) Balai Diklat Industri dan diikuti oleh berbagai sektor industri dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemperin Arus Gunawan, di Jakarta, Rabu (24/3).

Agus Gunawan menyampaikan bahwa penyelenggaraan diklat 3 in 1 saat ini diikuti 6.448 orang peserta, yang mencakup 16 provinsi dan 70 kabupaten/kota serta melibatkan 83 industri dan 32 dinas kabupaten/kota, dengan berbagai jenis diklat. Terdiri dari DIY 1.705 orang dimana beberapa pesertanya merupakan penyandang disabilitas. BDI Yogyakarta menyelenggarakan diklat operator jahit upper alas kaki, assembling alas kaki, operator jahit karung jumbo, upskilling looming plastik, dan finishing furniture sementara BDI Medan 950, BDI Padang 530 orang, BDI Jakarta 980 orang, BDI Surabaya 1.075 orang, BDI Denpasar 558 orang dan BDI Makassar 650 orang.

"Pelaksanaan diklat 3 in 1 ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja calon tenaga kerja yang akan bekerja di industri maupun memulai usaha baru, menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing serta untuk menanggulangi dan membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak yang diakibatkan oleh Pandemi COVID 19", ungkapnya. (SAL)

DITETAPKAN NASIONAL PADA 2020

DIY Tambah 14 WBTh



Ketoprak Yogyakarta menjadi WBTh asal DIY yang ditetapkan Kemendikbud RI. KR-Febriyanto

SEBANYAK 14 Warisan Budaya Takbenda (WBTh) asal DIY resmi ditetapkan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada akhir 2020. Dengan tambahan tersebut, artinya sudah ada 108 WBTh asal DIY yang mendapat pengakuan dan penetapan secara nasional sejak 2013 lalu.

"Sebenarnya pada 2020 kemarin kami mengusulkan lebih dari 40 WBTh DIY untuk ditetapkan secara nasional. Tapi karena adanya pandemi, Kemendikbud RI tidak dapat melakukan verifikasi secara menyeluruh. Sehingga tidak semua usulan bisa diverifikasi. Hal itu juga berlaku bagi daerah lain secara nasional," kata Kasi Pemeliharaan Pengembangan Warisan Budaya Takbenda Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) DIY Sri Wahyuni, Rabu (24/3).

Dijelaskan wanita yang akrab disapa Yuni tersebut, WBTh DIY

yang belum ditetapkan pada 2020 akan kembali diusulkan tahun 2021 ini. Setidaknya, ada 40 WBTh DIY yang diusulkan pada 2021 agar mendapatkan penetapan secara nasional.

"Karena masih dalam kondisi pandemi, kami juga belum tahu apakah masih ada pembatasan penetapan seperti tahun kemarin. Namun yang jelas, kami pada 2021 ini mengusulkan 40 WBTh DIY ke tingkat nasional," sambungnya.

Menurut Yuni, pihaknya tidak hanya tinggal diam terhadap WBTh yang sudah ditetapkan tersebut. Pasalnya ada kewajiban yang harus terus secara konsisten dilakukan terkait pengembangan dan pemeliharaannya. Selain itu juga, Kemendikbud RI terus melakukan pemantauan terhadap WBTh yang sudah ditetapkan agar kelestarian dan pengembangannya terus terjaga.

"Kami konsisten untuk terus

melestarikan, mengembangkan dan memelihara WBTh tersebut. Seperti halnya menampilkan dalam tiap agenda Dinas Kebudayaan maupun kegiatan lain," sambung Yuni.

Selain itu juga melalui kegiatan semacam malam apresiasi WBTh yang juga sudah rutin dilakukan Dinas Kebudayaan DIY dalam beberapa waktu belakangan ini. "Kami juga sudah sampaikan ke Dinas Kebudayaan di DIY agar terus memfasilitasi WBTh yang sudah ditetapkan di wilayah masing-masing agar bisa tetap eksis. Seperti kegiatan budaya, sudah terus berjalan rutin tiap tahun," katanya.

Meski dalam masa pandemi, Yuni juga menegaskan kegiatan pengembangan dan pelestarian WBTh di DIY tetap berjalan. Metode daring menjadi alternatif yang digunakan agar proses sosialisasi serta pemeliharaan tidak terhenti. (Feb)

DAFTAR WBTh YANG DITETAPKAN TAHUN 2020

TAHUN	DOMAIN		JUMLAH			
	1	2				
2020	Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda, termasuk cerita rakyat, naskah kuno, permainan tradisional;	Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, upacara tradisional;	Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenal alam dan semesta, termasuk pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional;	Seni pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater, seni suara, seni tari, seni musik, film;	Kemahiran kerajinan tradisional, termasuk seni lukis, seni pahat/ukir, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, makanan/minuman tradisional, moda transportasi tradisional	14
3	-Nilai-Nilai Ajaran Sestradi Puro Pakualaman -Babad Mangkubumi -Babad Ngayogyakarta HB 5 - HB 7	-Cing-Cing Golling -Madilakhran Wonotoro -Peksi Buroq -Kupatan Jolosutro -Rasulan	-Wayang Wong Thengul Yk -Ketoprak Yogyakarta -Krimpi Pandhelori -Reog Wayang	-Besengek Tempe Benguk -Busana Mataraman Yogyakarta	2	14